

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alatas, 1986, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok
- Atmasasmita, Romli, 1982, Kependaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Armico, Bandung
- Bayley, David H, 1995, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung
- Elwi, Danil, 2011, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1984, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2012. Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Klitgaard, Robert, 2001, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Maharso, Syahroni, Sujarwadi, Tomy, 2018, Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit, Deepublish, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- MD, Moh. Mahfud, 2003, Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di saat Sulit, LP3ES, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2015, Perlindungan Hukum *Whistle blower & Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*, PT Alumni, Bandung
- Pavlich, Geoge, 2002, Towards an ethics of restorative justice, dalam restorative justice and the law, ed walgrave, W. Willan Publishing, Oregon, Di kutip juga oleh Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah
- Priyatno, Dwidja, 2006, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2011, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung
- Semendawai, Abdul Haris, 2011, Memahami Whistleblower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta*
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 19, Rajawali Pers, Depok
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Waluyu, Bambang, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2021, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2018, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- Wijaya, Firman, 2012, Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta
- Wiyono, R. 2005, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani, Akbari, Anugerah Rizki, dan Samad, Zakky Ihksan, 2017, Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan, Rajawali Pers, Depok

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4635

UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5074

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3846

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4632

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5359

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223

Peraturan Bersama Kemenkumham RI, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK RI,
Ketua LPSK RI Tahun 2011, NOMOR : M.HH-11.HM.03.02.th.2011
Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang
Bekerjasama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

KARYA ILMIAH

Akbar, Anggi Rafsanjani & Lushiana Primasari, 2019, “Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasarakatan”, *Recidive*, Vol.8 no.2

Ansori, 2015, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Rechtsidee*, Vol.2 No.2

Ghozali, Elizabeth, 2016, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi erdasarkan Tujuan Pemasarakatan Di Indonesia, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Ghozali, Elizabeth, 2021, “Urgensi formulasi *justice kolaborator* sebagai syarat perolehan remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia” *jurnal Hukum*. Vol. 2 no. 1

Hendratno, Edie Toet, 2013, “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor ,Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.1 no.4

Hikmawati, Puteri, 2013, “Upaya Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Negara Hukum*. 4(1).

Manalu, River Yohanes. (2015). “*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Crimen*, 4(1).

Pertiwi, Esti Knti & Noor Rahmad, 2020, “Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* Dan *Wistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi”, *LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, Vol.25 no. 2

Pratiwi, Zhulfiana. (2014). “*Justice Collaborator* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban”. *Jurnal Al-Qadau*. 6(1), h. 39-58.

Sanjani, Fadli Razez. (2015). “Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. JOM Fakultas Hukum, 2(2).

Siagian, Yunita Oktavia, 2018, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Yang Berkedudukan Sebagai *Justice Collaborator*”, Departemen Hukum. Vol.1 No.1

Susetyo, Heru susetyo, 2012, tim pengkajian hukum, laporan tim pengkajian hukum tentang sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip restorative justice, badan pembinaan hukm nasional kementerian hukum dan HAM RI

Yuwanta, Velycia maya, 2019, pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan, Vol. 2, Nomor 4

WEBSITE/INTERNET

<https://akurat.co/news/id-426681-read-dua-faktor-penyebab-praktik-suap-di-lapas-sukamiskin> diakses terakhir pada hari Kamis, 23 Desember 2021 pada pukul 10.07 WIB

<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> diakses terakhir pada hari Senin, 20 Desember 2021 pada pukul 08.23 WIB

<https://m.merdeka.com/peristiwa/eks-penyidik-kpk-bicara-pentingnya-aturan-pengetatan-remisi-koruptor-yang-dicabut-ma.html> diakses terakhir pada hari Rabu, 22 Desember 2021 pada pukul 09.47 WIB

<https://m.merdeka.com/peristiwa/ma-cabut-aturan-pengetatan-remisi-koruptor-ini-tanggapan-maki.html> diakses terakhir pada hari Kamis, 23 Desember 2021 pada pukul 10.05 WIB

<https://m.merdeka.com/peristiwa/ma-cabut-pp-pengetatan-remisi-koruptor-kpk-harap-pertimbangkan-keadilan-masyarakat.html> diakses terakhir pada hari Selasa, 21 Desember 2021 pada pukul 13.25 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di> diakses terakhir pada hari Jumat, 10 September 2021 pada pukul 22.59 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp> diakses terakhir pada hari Rabu, 22 Desember 2021 pada pukul 07.01 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/17301831/ma-cabut-pp-99-tahun-2012-koruptor-lebih-mudah-dapat-remisi?page=all#page2> diakses terakhir pada hari Senin, 15 November 2021 pada pukul 07.01 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/17301831/ma-cabut-pp-99-tahun-2012-koruptor-lebih-mudah-dapt-remisi?page=all#page2> diakses terakhir pada hari Selasa, 21 Desember 2021 pada pukul 08.17 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/513412/13/214-napi-koruptor-dapat-remisi-sepanjang-2021-4-langsung-bebas-1629184137> diakses terakhir pada hari Senin, 20 Desember 2021 pada pukul 08.49 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5787651/ma-cabut-dan-batalkan-pp-pengetatan-remisi-koruptor> diakses terakhir pada hari Rabu, 22 Desember 2021 pada pukul 08.23 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5793796/pukat-ugm-nilai-argumen-ma-cabut-pp-pengetatan-remisi-koruptor-tak-kuat> diakses terakhir pada hari Senin, 20 Desember 2021 pada pukul 1.47 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5794122/cabut-pp-pengetatan-remisi-koruptor-ma-dinilai-salah-kaprah-restorative-justice> diakses terakhir pada hari Selasa, 21 Desember 2021 pada pukul 10.32 WIB

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3d4459c84c04983e313435333531.html> diakses terakhir pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 pada pukul 10.16 WIB

<http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/year/2020/monthly/3?q=grl/current/monthly/year/2020/mont/3> diakses terakhir pada hari Rabu, 22 Desember 2021 pada pukul 08.45 WIB

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/jumlah-upt-sebarannya> diakses terakhir pada hari Kamis, 23 Desember 2021 pada pukul 09.03 WIB

<http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/wbp-tindak-pidana-khusus> diakses terakhir pada hari Rabu, 22 Desember 2021 pada pukul 09.25 WIB

<https://www.antikorupsi.org/id/article/pembatalan-pp-pengetatan-remisi-berkah-bagi-koruptor> diakses terakhir pada hari Rabu, 22 Desember 2021 pada pukul 10.03 WIB

<https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021> diakses terakhir pada hari Senin, 13 Desember 2021 pada pukul 9.21 WIB

<https://www.ditjenpas.go.id/134.430-wbp-terima-remisi-kemedekaan-tahun-2021> diakses terakhir pada hari Rabu, 15 Desember 2021 pada pukul 08.09 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi-pengertian-penyebab-dan-dampaknya?page=all> diakses terakhir pada hari Senin, 15 November 2021 pada pukul 06.35 WIB